KAPABILITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PRABUMULIH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh :

YODI AZWARZAH
Nim. 07011381419118

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

KAPABILITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PRABUMULIH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATRA SELATAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

YODI AZWARZAH
Nim. 07011381419118

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Maret 2019

Pembimbing 1

Dr. Nengyanti, M. Hum
NIP. 196704121992032002

Pembimbing II

Drs. H. Joko Siswanto, M. Si
NIP. 195706051985031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Kapabilitas *Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkootika di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 29 Maret 2019.

Inderalaya, 29 Maret 2019

Ketua :

Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

Anggota
Drs. H. Joko Siswanto, M.
NIP. 195706051985031003

Dr. Nurmah Semil, M. Si
NIP. 196712011992032002

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Mengetahui,

Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“USAHA TIDAK AKAN MENGHIANATI HASIL, HASIL TIDAK AKAN ADA TANPA ADA USAHA, USAHA TIDAK AKAN ADA TANPA ADA NIAT DARI DALAM HATI”

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk:

- **Almamaterku**
- **Dosen Fisip Unsri**
- **Ayahku Tercinta Alidin dan Ibuku Tersayang Nuraida**
- **Kakakku Indra Sumarlin S.Pd, Ayuk ipar Impyani S.Pd, Izariani STr. Keb, Kakak ipar Adi putra S.E dan Adikku Yebi Riswanto**
- **Pasanganku**
- **Temen-teman AN 2014 FISIP UNSRI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kapabilitas Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan)". Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat kurikulum pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Sebagai seorang manusia yang memiliki kemampuan terbatas, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang dialami dalam penyusunan skriggggggpsi ini. Namun berkat pertolongan dari-Nya dan dukungan dari keluarga, kedua orang tuaku, serta saudarasaudaraku maka kendala tersebut dapat diatasi. Skripsi ini disusun atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang memberikan kontribusi sangat berharga kepada penulis. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, M.PA selaku Wakil Dekan III FISIP Unsri yang telah memberikan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsri dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsri yang telah memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nengyanti, M. Hum selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran, dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Joko Siswanto, M. Si selaku Dosen pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran, dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. ibu DRA. Retno Susilowati, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memperlancar dalam proses akademik dan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen FISIP Unsri yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku kuliah.
8. Seluruh karyawan FISIP Unsri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Pimpinan dan Staf Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis dan

senantiasa membantu penulis dalam memberikan kelengkapan data-data guna menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman satu angkatan Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2014 yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Semoga segala bantuan dan keikhlasan Bapak/Ibu mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua.

Palembang,
2019
Penulis,

Yodi Azwarzah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
ABSTRACT ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR BAGAN ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, ATAU LAMABANG ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelititan 9
1. Secara Teoritis
2. Secara Praktis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 10
B. Konsep Kapabilitas 10
1. Definisi Kapabilitas 10
2. Definisi Organisasi 12
3. Definisi Badan Narkotika Nasional 13
4. Definisi Narkotika 14
5. Definisi Kapabilitas Organisasi 14
6. Faktor-faktor pendukung Kapabilitas organisasi 17
7. Indikator Kapabilitas Organisasi 18
C. Penelitian Terdahulu 22
D. Kerangka Pemikiran 24

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 28
B. Definisi Konsep 29
C. Fokus penelitian 31
D. Jenis dan Sumber 33

E. Informan Penelitian 34
F. Teknik Pengumpulan Data..... 34
G. Teknik Analisis 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum lokasi penelitian..... 38
   1. Sejarah singkat Badan Narkotika Nasiona..... 38
   2. Peta lokasi Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih 42
B. Gamabaran umum Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih 42
   1. Sejarah singkat Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih 42
   2. Visi dan misi Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih..... 43
   3. Bagan struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih..... 44
   4. Tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih 45
   5. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih 46
   6. Susunan organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih 47
C. Analisis Kapablitas Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Prabumulih..... 47
   1. Kapablitas Kelembagaan Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Prabumulih 48
   2. Kapablitas sumberdaya manusia Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Prabumulih 53
   3. Kapablitas implementasi kebijakan Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Prabumulih 58
   4. Kapablitas keuangan Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Prabumulih..... 66
   5. Kapablitas teknik Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Prabumulih..... 68
   6. Kapablitas kepemimpinan Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Prabumulih 74

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 78
B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Data Jenis Narkoba Yang Digunakan Pertahun 6
1.2 Jumlah Pengguna Narkoba yang di Rehabilitasi Pertahun 7
2.1 Penelitian Terdahulu 23
3.1 Fokus Penelitian 32
3.2 Informan Penelitian 34
4.1 KASIE P2M 54

DAFTAR BAGAN

2.1 Faktor Pendukung Kapabilitas 17
2.2 Dimensi Kapabilitas 18
2.3 Kerangka Pemikiran 26
4.1 Struktur Organisasi BNN Kota Prabumulih 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat tugas pembimbing usulan penelitian
2. Surat keputusan pembimbing skripsi
3. Kartu bimbingan usulan penelitian
4. Kartu bimbingan skripsi
5. Lembar revisi seminar usulan skripsi
6. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik
7. Surat izin pengambilan data dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih
8. Pedoman wawancara
9. Pedoman observasi
10. Pedoman dokumentasi

DAFTAR GAMBAR

4.1 pengantaran penyalahgunaan narkotika ke lembaga rehabilitas 50
4.2 pengembangan kapasitas P4GN di Instansi pemerintah 50
4.3 Sosialisasi BNNK Prabumulih ke Sekolahan 55
4.4 Akun media sosial Instagram BNNK Prabumulih 60
4.5 Akun media sosial Facebook BNNK Prabumulih 61
4.5 bentuk sosialisasi yang dilakukan BNNK prabumulih 62
4.6 Sosialisasi BNNK Prabumulih ke PT Partamina EP..... 69
4.7 Kunjungan kerja BNNK Prabumulih ke BNNP Sumatera Selatan..... 72
4.8 Kepala BNNK Kota Prabumulih memimpin rapat P4GN 74

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

BAKIN : badan koordinasi intelegen nasional
APBN : Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara
BNP: Badan Narkotika Provinsi
BNK Badan Nrakotika Kota
BNN: Badan Narkotika Nasional
BNNP: Badan Narkotika Nasional Provinsi
BNNK: Badan Narkotika Nasional Kota
SDM: Sumber Daya Manusia
BNNP: Badan Narkotika Nasional Provinsi
LPNK: Lembaga Pemerintah Non Kementrian
P4GN: Penyalahgunaan, Pemberantasan, Pencegahan, dan Peredaran gelap Narkotika
P2M: kasi Pencegaan dan Pemberdayaan Masyarakat
KASUBBAG: Kepala Sub Bagian
NAPZA: Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
SOP: Standar Oprasioanl Prosedur

ABSTRAK

Penelitian ini dilatari tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di Kota Prabumulih yang sudah tergolong memprihatinkan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kapabilitas Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kapabilitas menurut Kusumasari yang menyatakan ada enam aspek kapabilitas penentu keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkotika yaitu kelembagaan, sumberdaya manusia, implementasi kebijakan, keuangan, teknik, dan kepemimpinan. metode yang digunakan metode dsekriptip kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dari enam aspek kapabiliitas organisasi BNNK Prabumulih lima aspek yang sudah memenuhi kriteria kapabilitas organisasi dan satu yang belum sesuai. Aspek- aspek yang sudah memnuhi kriteria yaitu: aspek kapabilitas kelembagaan sudah efektif dan mampu menjalin jaringan dengan kepolisian, dan rumah sakit dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Aspek kapabilitas sumberdaya manusia sudah efektif dalam melakukan pencegahan sebab petugas lapangan memiliki kompetensi yang sesuai yang berasal dari kalangan akademisi serta memiliki kecakapan teoritis dan praktis. Aspek implementasi kebijakan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku serta para pelaksanan kebiojakan sudah sepenuhnya memahami standar sasaran kebijakan yang telah ditetapakan oleh keijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Aspek kapabilitas teknik sudah terjalin koordinasi antara BNNK Prabumlih dengan masyarakat guna mempelancar kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Aspek kepemimpinan BNNK Prabumulih sudah konsisten dalam melakukan kegiatan penecegahan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan aspek yang belum memenuhi criteria yaitu: Aspek keuangan karena masih terdapat ke tidak sesuaian anggaran yang di usulkan dengan yang diterima oleh karena itu saran penelitian ini agar kapabilitas BNNK Prabumulih sempurna harus memperhatikan aspek keuangan.

Kata Kunci: Kapabilitas Badan Narkotika Nasional Kota Prabumlih, Kelembagaan, Sumberdaya manusia, Implmentasi kebijakan, keuangan, Teknis, Kepemmpinan , Pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Pembimbing I	Pemimbing II
Dr. Nengyanti, M. Hum	Drs. H. Joko Siswanto, M. Si
NIP. 196704121992032002	NIP. 195706051985031003

Inderalaya, April 2019
Ketua jurusan ilmu administrasi publik
Fakultas ilmu social imu politik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA

NIP. 198108272009121002

ABSTRACK

This research is based on the high level of drug abuse in Prabumulih City which has been considered alarming and the lack of public awareness of the dangers of narcotics. This thesis aims to determine the capability of Prabumulih City National Narcotics Agency. The theory used in this study is the Capability theory according to Kusumasari which states that there are six aspects of the capability of determining the success of preventing narcotics abuse, namely institutional, human resources, policy implementation, finance, engineering, and leadership. the method used is qualitative descriptive method. Data collection techniques using observation, interview, and documentation techniques. The results of the study showed that from the six aspects of organizational capacity, Prabumulih BNNK had five aspects that had met the criteria for organizational capability and one that was not yet appropriate. Aspects that have met the criteria, namely: the aspect of institutional capability has been effective and able to establish a network with the police, and hospitals in preventing narcotics abuse. Aspects of human resource capability have been effective in carrying out prevention because field officers have appropriate competencies that come from academics and have theoretical and practical skills. Aspects of policy implementation have been carried out in accordance with applicable regulations and policy implementers have fully understood the standards of policy targets that have been established by the policy to prevent narcotics abuse. The technical capability aspect has been established in coordination between BNNK Prabumlih and the community to facilitate prevention of narcotics abuse. The leadership aspect of BNNK Prabumulih has been consistent in conducting prevention of narcotics abuse. While the aspects that have not met the criteria are: Financial aspects because there are still incompatibilities to the budget proposed by those received because of this suggestion so that the capability of BNNK Prabumulih perfectly must pay attention to financial aspects.

Keywords: Capability of Prabumlih City National Narcotics Agency, Institution, Human Resources, Policy Implication, Finance, Technical, Leadership, Prevention of narcotics abuse.

Advisor I

Dr. Nengyanti, M. Hum
NIP. 196704121992032002

Advisor II

Drs. H. Joko Siswanto, M. Si
NIP. 195706051985031003

Inderalaya, April 2019
Chairman of The Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Science

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA

NIP. 198108272009121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan organisasi dan kelembagaan pemerintah yang diberikan kewenangan dalam penanganan narkotika sudah dimulai dari tahun1971 dengan dikeluarkannya InstruksiPresiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intellijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing. Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak secara spesifik mendapat alokasi anggaran dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Bakolak Inpres bekerja sama dengan departemen terkait antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, Departemen Kehakiman, dan sejumlah instansi lainnya.

Berdasarkan pada perkembangan kiprah Bakolak Inpres tersebut, pemerintah bersama dengan anggota DPR RI membuat peraturan yang

mengatur tentang narkotika.Peraturan tersebut adalah UU Nomor 9 Tahun 1976. Undang-Undang tersebut lahir setelah sebelumnya DPR meratifikasi UN Single Convention on Narcotic Drugs 1961 dan diamandemen dengan protocol 1972 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976.Tahun 1997 Pemerintah Indonesia dan DPR RI mengesahkan dua peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan bahaya Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pada tahun 1999 pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional atau disingkat BKNN. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan Narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN secara ex-officio diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Namun demikian guna menjalankan pelaksanaan tugas sehari-hari pemerintah membuat jabatan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar). Pelaksanaan BKNN berlangsung hingga tahun 2002 dan mengalami dua masa periode kepala pelaksana harian. Kalakhar BKNN pertama kali di jabat oleh Drs. Achwil Lutan, SH dan kemudian dilanjutkan oleh Drs. Da'I Bachtiar.BKNN sebagai badan koordinasi dianggap tidak cukup memadai untuk menghadapi sindikat Narkoba yang makin serius menebar ancamannya. Hal tersebut dikarenakan BKNN tidak mempunyai anggaran dan personil sendiri yang dapat diandalkan guna menyelesaikan permasalahan Narkoba tersebut.Dibutuhkan lembaga dengan kewenangan dan kemampuan yang lebih besar guna mengatasi

permasalahan Narkoba. Karena itulah melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya serta TAP MPR No. VI/MPR/2002tentang Rekomendasi atas laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI tahun 2002, maka padatanggal 22 Maret 2002 Badan Koordinasi Nasional (BKNN) diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan memiliki 25 anggota dari departemen dan lembaga pemerintah terkait. Kapolri selaku ketua Ex Officio bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepala Pelaksana Harian BNN yang pertama dijabat oleh Drs. Nurfaizi. Menyikapi perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002mengeluarkan Ketetapan MPR-RI Nomor : VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun1997 tentang Narkotika dalam rangka efektifitas penanganan narkoba. Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika namun dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur kelembagaan yang menangani masalah narkoba secara efektif, oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota), yang memiliki kewenangan operasional melalui Anggota BNN/BNP/BNK/Kota dengan instansi terkait.

Adapun pertanggungjawaban masing-masing adalah sebagai berikut: BNN bertanggung jawab kepada Presiden, BNP kepada Gubernur dan BNK/Kota kepada Bupati/Walikota, secara organisatoris institusi tersebut tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal. Pada implementasinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota) kurang efektif. Dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur pembentukan kelembagaan dan kewenangan BNN dibidang penyelidikan serta penyidikan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika. Dalam UU tersebut status kelembagaan BNN ditetapkan menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang sekretaris utama, inspektur utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Rehabitasi Deputi Bidang Pemberantasan, dan Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala BNN Nomor : KEP/03/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Narkotika Nasional, Peraturan Kepala BNN Nomor : KEP/04/V/ 2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional telah memiliki organisasi vertikal hingga ke tingkat kabupaten/kota.Lembaga vertikal BNN hingga kewilayah provinsi disebut sebagai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang saat ini telah berdiri di seluruh provinsi di Indonesia. Lembaga vertikal BNN di tingkat Kabupaten/Kota dinamakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK).Hingga saat ini telah berdiri 173 BNNK.(*https://bnn.go.id/sejarahdiakses tanggal 18 januari 2019)*

Salah satu BNNK tersebut adalah Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih yang berada di BNNP Sumatera Selatan yang merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertugas mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi yang bersangkutan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional di bidang ketersediaan dan Penyalahgunaan, Pemberantasan, Pencegahan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Berdasarkanberita di media internet *sumsel,Tribunnews.com tanggal 9 maret 2018* yang diakses pada tanggal 15 april 2018, penyalahgunaan narkotika di Kota Prabumulih tergolong sangat memprihatinkan, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih memiliki keterbatasan dalam penindakan dan rehabilitasi baik keterbatasan anggaran, personil maupun sarana prasarana yang di ungkapkan langsung oleh kepala BNN Kota Prabumulih oleh karena

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BBN Kota Prabumulih dibandingkan BNN Kota lain.

Lembaga Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala dan Kasubag Umum serta Kasi P2M, Kasi Rehabilitasi dan Kasi Pemberantasan guna membantu pemerintah pusat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Narkotika di kalangan masyarakat yang ada di wilayah kota Prabumulih.

Penyalahgunaan narkoba yang semakin marak dan telah menjangkit berbagai kalangan masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Narkotika di Kota Prabumulih dengan melakukan berbagai program diantaranya advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba, pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba tentang penyalahgunaan, pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di lingkungan intansi Pemerintah dan instansi Swasta, pendidikan, serta masyarakat. Berdasarkan wawancara (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Muhammad Satrio, SKM), upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih melalui berbagai program tersebut diharapkan dapat menekan tingkat penyalahgunaan narkoba di Kota Prabumulih, namun pada kenyataannya angka penggunaan narkoba di Kota Prabumulih mengalami peningkatan.Fakta tersebut dapat diketahui dari data masyarakat yang direhabilitasi tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1

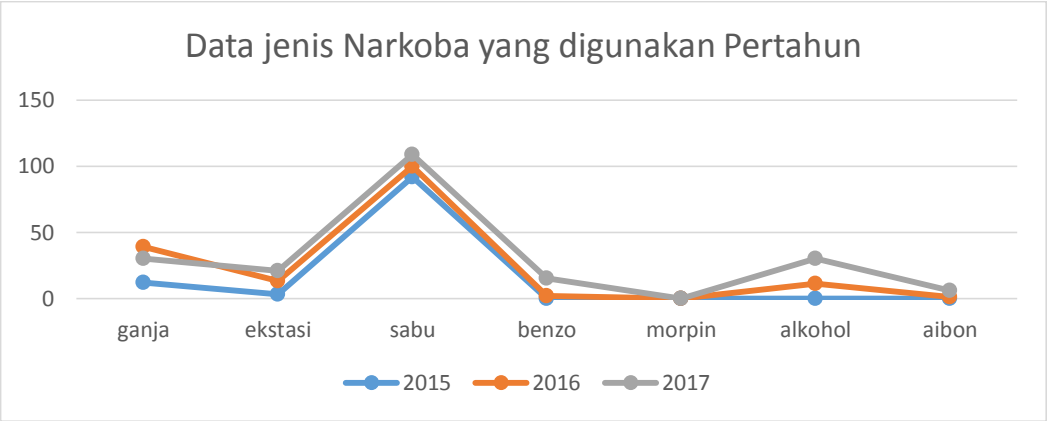

Sumber: Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih

Dari table 1.1 dapat dilihat bahwa penggunaan narkoba di Kota Prabumulih berjenis ganja, ekstasi, sabu, benzo, morfin, alkohol, dan aibon. Yang dari tahun ketahun selalu meningkat, dari hasil data yang diperoleh dari table 1.1 bahwa di Kota Prabumulih jenis pengguna narkoba terbesar berjenis sabu yang tiap tahunnya meningkat dari tahun 2015 sebanyak 92 orang, 2016 sebanyak 100, dan pada tahun 2017 sebanyak 109 orang. Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Rehabilitasi pasal 54 yang berbunyi "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik yang ditangkap dan menjadi limpahan maupun yang datang sendiri."

TABEL 1.2

Jumlah Pengguna Narkoba yang di Rehabilitasi Pertahun

TAHUN	Target BNN RI	Jenis kelamin		Rawat jalan	Rawat inap	Usia										Jumlah Residen	Hasil target yag diharapkn
						<20		21-30		31-40		41-50		>51			
		Lk	Pr			Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr		
2015	45	99	8	41	66	31	1	39	4	23	2	6	1	0	0	107	Tercapai
2016	75	160	15	14	161	66	4	52	6	36	4	5	1	1	0	175	Tercapai
2017	50	90	11	74	27	30	0	29	7	27	4	3	0	1	0	101	Tercapai
Jumlah Total						132		137		96		16		2		383	

Sumber:DokumentasiBadan Narkotika Nasional Kota Prabumulih, 2018

Berdasarkan pada data masyarakat yang direhabilitas Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih pertahun pada table 1.2 memiliki jumlah total residen sebanyak 383 orang. Berdasarkan data pada setiap tahunnya, tahun 2016 menjadi tahun terbanyak masyarakat yang di rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dengan jumlah sebanyak 175 orang sedangkan berdasarkan usia pada usia 21-30 merupakan usia yang paling banyak di rehabilitasi selama tiga tahun terakhir dengan jumlah sebanyak 137 orang dengan kata lain dapat di kategorikan penyalahgunaan narkoba di Kota Prabumilih didominasi oleh kalangan remaja. Berdasarkan wawancara (Pengelola data Sie Rehabilitasi BNN Kota Prabumulih, Ruswandi, A.Md) bahwa setiap tahunnya Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih memiliki target untuk yang di rehabilitasi dari BNN Republik Indonesia baik rawat inap maupun rawat jalan, pada table 1.2 tahun 2015, 2016, 2017 BNN Kota Prabumulih telah mencapai target yang ditentukan oleh BNN RI.

Tetapi berdasarkan jumlah total pengguna narkoba yang ada di Kota Prabumulih berdasarkan wawancara dengan (Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih, H Ibnu Munzakir Ssos Msi) mengatakan bahwa saat ini sebanyak 1,97 persen atau 3819 orang yang tergolong memprihatinkan dalam penyalahgunaan narkotika di Kota Prabumulih (*sumber:BNN Kota Prabumulih*) dari data 3 tahun terakhir masyarakat yang di rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap serta hasil dari limpahan brantas maupun instansi terkait seperti polri, kesbangpol dan lainnya hanya berjumlah 383 orang kurang lebih 10% dari jumlah pengguna.

Melihat fenomena penyalagunaan narkotika di Kota Prabumulih yang telah menjalar di berbagai kalangan masyarakat maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Kapabilitas Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Kota Prabumulih"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah peneliti yaitu " Bagaimana Kapabilitas Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Kota Prabumulih ?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini bertujuan untuk "Mengetahui Kapabilitas terhadap Badan Narkotika Nasional

Kota Prabumulih dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Kota Prabumulih."

D. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara tioritis
   a) Sebagai sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.
   b) Penelitian ini mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara terutama mengenai KapabilitasBNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
2. Secara praktis
   a) Memberikan informasi khususnya bagi kaum muda yang akan menjadi penerus bangsa akan bahayanya narkoba.
   b) Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih dalam meningkatkan kapabilitas BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan Masyarakat Kota Prabumulih.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Afifuddin, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung*: CV. PustakaSetia

Faisal Afiff, 2010, *manajemen strategic keorganisasian publik.* Jakarta: PT Refika Aditama

H. B. Siswano, 2005, *pengantar manajemen*, Jakarta:PT Bumi Aksara

Ig Wursano, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi

Kusdi,2009,*Teori Organisasidan Administrasi*. Salemba Humanika: Jakarta

Kusumasari, Bevaola, 2014,*Manajemen Bencanadan KapabilitasPemerintahLokal.*

PT Gava Media: Yogyakarta

Mardiasmo, 2017, *peningkatan kapabilitas pengelolaan badan layanan umum dan badan*

layanan umum daerah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

M. Manullang, 2012, *Dasar-dasar manajemen.* Yogyakarta: Gadja mada University Pree

Sampurno, 2011, *Manajemen Stratejik: menciptakan keunggulan Bersaing Yang Berkelanjutan.*

Yogyakarta: Gadja Mada University Press

INTERNET:

BNN,2019, sejarah Badan Narkotika Narkoba

(https://bnn.go.id/sejarah/diakses tanggal 18 januari 2019)

Sumsel,tribunnews. 2018. menyalahgunakannarkoba (*http://sumsel.tribunnews.com/2018/03/09/sebanyak-3819-warga-prabumulih-menyalahgunakan-narkoba*/ diaksespadatanggal 15 april 2018)

Wikipidia, 2018. BadanNarkotikNasional

(https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional,diakses pada tanggal 2 November 2018)

Wikipedia. 2018. definisiBadanNarkotikaNasional

(*https://id.m.wikipedia.org/wiki/BadanNarkotikaNasional,/* diaksespadaTanggal 14 September tahun 2018*)*

Dokumen:

- Data jenis narkoba yang digunakan pertahun
- Jumlah pengguna narkoba yang di rehabilitas pertahun
- Struktur Organisasi BNNK Prabumulih
- Kunjungan kerja BNNK Prabumulih ke BNNP Sumatera Selatan